

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Ilmu, Jakarta, 1994.
- Bambang Purnomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Leiden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.
- Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1999, *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara*.
- Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1999, *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa*.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.
- Soejono Koesoemo Sisworo, *Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1978.
- Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1992.
- Sri Sumarwani, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971*, Disertasi, Tanpa Penerbit, 1998.
- Sudarto, *Hukum Pidana I-B*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.

- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1991.
- Syed Husain Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1997.
- Ketetapan MPR .R.I.No.IV/MPR/1999 Tentang GBHN*, Arkola, Surabaya,2000.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981, *Tentang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang No.28 Tahun 1999, *Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.
- Undang-Undang No.31 Tahun 1999, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2001, *Tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang No.3 Tahun 1971, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.